

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada Desa. Desa diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan- kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan adanya UU tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapinya dengan baik konsekuensi dengan munculnya Undang-Undang tersebut.

Untuk melaksanakan otonomi yang telah diberikan tersebut, Pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap desa memiliki kemampuan tentu sangat yang berbeda dalam mengelola keuangan tersebut. Secara eksplisit semuanya dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas kegiatan desa atas pengelolaan pendapatan desa dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah saat ini sedang

berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa agar berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan langkah maju yang besar di desa saat ini, terutama dalam hal kegiatan desa. Menurut Devi (2014), peran pemerintah dalam pengembangan program nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yakni tata olah pemberdayaan masyarakat perdesaan. Untuk itu, pemerintah desa melakukan pembangunan berbasis sumber daya yang dapat peningkatan kualitas dan efesiensi melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Era globalisasi saat ini yaitu sesuatu yang tidak dapat di hindari oleh seluruh masyarakat indonesia. Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat di dunia yang memiliki kewajiban secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik yaitu merupakan sesuatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal maupun administratif. Pemerintahan yang baik di tandai dengan tiga elemen yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi yaitu di bangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Partisipasi yaitu mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Santoso dalam gramini, et. Al, 2017).

Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat (mardiasmo,2010:1). Dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah desa yaitu terdiri dari kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. UU nomor 32 tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya asal- usul adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna desa sangat identik dengan masyarakat miskin dan tradisonal, akan tetapi desa juga mempunyai kearifan (lokal wisdom) yang sangat luar biasa. Dimana desa merupakan salah satu penemu sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat, desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial masing-masing (Iqsan,2016).

Kecamatan Nggaha Ori Angu adalah kecamatan yang berada di Sumba Timur yang terdapat 8 desa yaitu desa Praihambuli, Praipaha, Tana Tuku, Praikarang, Pulu Panjang, Ngadu Langgi, Tandula Jangga, dan Maka Menggit. Peneliti disini meneliti 4 desa yaitu Praihambuli, Praikarang, Tana Tuku, dan Praipaha untuk mengetahui APBDes dari ke empat desa tersebut.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik di belanjakan, akan tetapi menunjukkan kemampuan bahwa uang publik dibelanjakan secara efisien,

efektif, dan ekonomis. Efisien yaitu penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan public, kemudian ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Anggaran digunakan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran di perlukan karena adanya kebutuhan tersebut terus-menerus berkembang (Siregar,2015:28). Adanya otonomi desa, maka pemerintah desa memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pemerintah desa di tuntutan untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini penyusunan APBDes masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) maka seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali di buat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin di dapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran di harapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah di buat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah di lakukan dan rentan akan terjadinya infisiensi atau pemborosan dan kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja di buat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan

secara luas sudah di tetapkan pada lembaga publik khususnya pemerintah desa masih sangat terbatas. Hal ini di karenakan: 1) Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah desa yang sifat dan cakupannya berbedadengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. 2) Penyusunan APBDes sebagian besar masih dilakukan berdasarkan perimbangan anggaran tradisonal (*incremental budget*) yaitu besarnya pendapatan masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran di hitung dengan meningkatkan sejumlah presentase tertentu. Oleh sebab itu sering sekali mengabaikan rasio keuangan dalam APBDes. 3) Penilaian keberhasilan APBDes sebagai penilaian bertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa lebih di tekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi atau struktur APBDes.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang di capai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022). Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, mengukur bagaimana aktivitas pemerintahan desa dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, serta melihat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam perolehan pendapatan daerah. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat penting dalam memperoleh sumber-sumber keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang dikelola pemerintah desa.

Tabel 1.1
Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Kecamatan Nggaha Ori
Angu Tahun 2017-2021

Anggaran	Tahun	Desa			
		praihambuli	Tana tuku	praipaha	Praikarang
Pendapatan	2017	1.824.465.600	1.275.345.800	1.319.114.000	1.362.907.671
	2018	1.771.786.400	1.250.035.000	1.444.143.200	1.333.498.900
	2019	1.830.907.700	1.288.860.200	1.488.967.900	1.373.237.900
	2020	1.840.451.600	1.240.844.700	1.430.537.900	1.340.947.500
	2021	1.830.462.400	1.288.085.200	1.469.534.600	1.402.122.200
Realisasi	2017	1.824.465.500	1.275.345.800	1.318.432.400	1.340.675.600
	2018	1.770.780.400	1.250.070.000	1.443.650.800	1.315.154.600
	2019	1.720.855.000	1.280.641.300	1.480.954.300	1.370.865.400
	2020	1.840.451.600	1.240.840.600	1.430.537.900	1.340.947.500
	2021	1.825.460.400	1.288.085.200	1.469.534.600	1.401.190.800

Sumber : APBDes nggaha ori angu tahun 2017-2022

Tabel 1.1 menunjukkan pendapatan dan realisasi dana desa dari 2017-2021. Realisasi anggaran yang di maksud adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang diterima desa dari tahun 2017-2021 berjumlah cukup besar.

Proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa di butuhkan perangkat desa yang memiliki kinerja handal dan di dukung dengan fasilitas

yang memadai sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat di pahami dan di mengerti oleh berbagai pihak dan perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan desa saat ini. Dalam posisi keuangan dengan cara mengetahuinya setelah di lakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah di rencanakan sebelumnya atau tidak. Pihak pemilik dan manajemen pada akhirnya dengan mengetahui posisi keuangan dapat di rencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus di lakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang di inginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah di perolehnya selama ini. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang di harapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut di analisis dan di interpretasikan sehingga di ketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Semuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan

desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa yang di tuntut semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi, menjadi daya tarik penulis untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa selama ini, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan terutama dalam menilai apakah pemerintah desa mampu dan berhasil dalam mengelola keuangan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa, atau sebaliknya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada kecamatan ngaha ori angu kabupaten sumba timur yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja

suatu pemerintahan. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir 2017-2021.

Kinerja keuangan desa merupakan tingkat suatu pencapaian hasil kerja di bidang keuangan desa yang meliputi penerimaan serta belanja desa dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban desa berupa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, mengukur bagaimana aktivitas pemerintahan desa dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, serta melihat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam perolehan pendapatan daerah. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat penting dalam memperoleh sumber-sumber keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan pemerintah desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang di kelola pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelola keuangan desa di butuhkan perangkat desa yang memiliki kinerja handal dan di dukung dengan fasilitas yang memadai sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan di mengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai APBDes di antaranya yaitu oleh Hafsyah intan martiastuti *dkk*,2021. 1). Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan rasio efisiensi sudah dapat dikatakan efisien karena rata-rata efisiensinya dari tahun 2015-2019 di bawah 100% yaitu sebesar 98%. 2). Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan Rasio Kemandirian dapat diketahui masih belum mandiri. Hal ini dikarenakan PADes yang belum menghasilkan dari tahun 2015-2019 sehingga rasio kemandirian dari tahun 2015-2019 adalah 0% dan pola hubungannya adalah instruktif. 3). Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan dapat diketahui tumbuh secara positif. Hal ini diketahui berdasarkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 25% per tahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif.

Peneliti lainnya yaitu oleh Noni benia harefa *dkk*,2019. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengeloan anggran pendapatan dan belanja desa Lololakha berada pada kategori efektif yang menunjukkan angka 94%. Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan

bidang pembinaan kemasyarakatan yang menurun angka 73%.

Peneliti lainnya yaitu oleh Dewi Nur Aini *dkk,2023*. 1). Kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor desa Jati Mulyo Tanjung jabung Timur jika dilihat dari rasio Efektivitas dikategorikan sudah efektif, karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2017-2021 di atas 90% yaitu 93%. Berdasarkan perhitungan dari rasio efektivitas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas alokasi dana desa (ADD) keuangan kantor desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 sebesar 99,34%, tahun 2018 sebesar 99,14%, tahun 2019 sebesar 99,08%, tahun 2020 sebesar 94,81%, dan tahun 2021 sebesar 93,00%. Efektivitas kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Jati Mulyo Tanjung jabung Timur dari tahun 2017 sampai tahun 2021 di kategorikan efektif walaupun terjadi penurunan di setiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkat rasio 90%. 2). Kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Jati Mulyo Tanjung jabung Timur jika dilihat dari rasio pertumbuhan tumbuh secara negatif. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja alokasi dana desa (ADD) dari tahun 2017- 2021 <50%. Rincian rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: tahun 2017 sebesar 3,24%, tahun 2018 sebesar 0,56%, sebesar 20,89%, tahun 2020 sebesar 13,2% dan pada tahun 2021 sebesar -5,47%. Sedangkan rincian rasio pertumbuhan alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: tahun 2017 sebesar 3,08%, tahun 2018 sebesar 0,36%, tahun 2019 sebesar 20,80%, tahun 2020 sebesar -16,97%, dan pada tahun 2021 sebesar -5,4%.

Maka dari itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa. Melihat pembahasan mengenai permasalahan dari uraian di atas maka untuk pembahasan yang lebih jelasnya akan dibahas dalam uraian berikutnya dan hasil dari penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan di Kecamatan Nggaha OriAngu Kabupaten Sumba Timur”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pemerintah desa di kecamatan Nggaha Ori Angu berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka persoalan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan APBDes berdasarkan rasio efektivitas.
2. Bagaimana kinerja keuangan APBDes berdasarkan rasio pertumbuhan.
3. Bagaimana kinerja keuangan APBDes berdasarkan rasio kemandirian.

1.4. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan APBDes berdasarkan rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian pada kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten

Sumba Timur

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarat untuk mendapat gelar pada jurusan akuntansi dan agar mendapat pemahaman lebih dalam tentang kinerja keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur.

2. Bagi lembaga

Dapat bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman agar bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

3. Bagi akademik.

Dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian analisis APBDes.